



Upaya BP Batam Dalam Mengembangkan Pembangunan Di Kota Batam

Nathasia Angelina Saragi

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: angelinanathasia12@gmail.com

Omi Omi

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: Omio6877@gmail.com

Mellyana Candra

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: Mellyana1001@gmail.com

Abstract. Batam is the authority responsible for developing the growth of the Batam island industrial area, authority over the allocation and use of land in order to carry out the development of Batam as an industrial area. The Batam Authority, which is currently called the Batam Free Trade Zone and Free Port Concession Agency (abbreviated as BP Batam) is a central government institution/agency formed based on the Government Regulations of the Republic of Indonesia. This research uses literature review and interviews to get an idea of the efforts of the Batam city government. in the development developments in the city of Batam, therefore in this article there are various sources of data and references. The data collection method is a method used to find various sources of data needed for research. Future plans for the development of BP Batam will continue and it is planned that until 2029 development in the city of Batam will continue to be encouraged in order to support economic products so that they are even better; even the development carried out by BP Batam is an extension of the development of Rempang, because in Rempang several companies such as glass companies and also companies operating in the tourism sector will be built in Rempang. BP Batam also shows its seriousness in developing Batam City by implementing a number of strategic infrastructure projects such as highways and airport development. BP Batam also plans to develop Rempang Island to become a new driving force for Indonesia's economic growth.

Keywords: BP Batam, Development, Government

Abstrak, Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri pulau Batam, kewenangan dalam peruntukkan dan penggunaan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam sebagai kawasan industri. Otorita Batam yang saat ini bernama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Penelitian ini menggunakan kajian literatur dan wawancara untuk mendapatkan gambaran tentang apa saja upaya pemerintah kota Batam dalam perkembangan pembangunan yang ada di kota Batam, maka dari itu dalam artikel ini terdapat berbagai sumber data dan referensi. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam menemukan berbagai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Rencana ke depan pembangunan BP Batam terus dilanjutkan dan direncana sampai tahun 2029 pembangunan di kota batam akan terus digalakkan guna menunjang produk ekonomi supaya semakin baik bahkan pengembangan yang dilakukan oleh BP batam adalah perluasan pembangunan Rempang, karena di rempang ini nanti akan di bangun beberapa perusahaan seperti perusahaan kaca dan juga perusahaan yang bergerak di bagian pariwisata BP Batam juga menunjukkan keseriusannya mengembangkan Kota Batam dengan menerapkan sejumlah infrastruktur strategis proyek seperti jalan raya dan pengembangan Bandara Selain itu, BP Batam juga berencana mengembangkan Pulau Rempang untuk dijadikan sebagai motor penggerak baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: BP Batam, Pembangunan, Pemerintahan

PENDAHULUAN

Kota Batam merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Kepulauan Riau. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau jumlah penduduk di Kota Batam yaitu sebanyak 1,1 juta penduduk atau 58% dari penduduk Kepulauan Riau. Kota Batam memiliki lokasi yang sangat strategis karena berdekatan dengan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia (bpbatam.go.id, n.d). Pada masa kepemimpinan Ibnu Sutowo, lahir Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menetapkan Otorita Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri pulau Batam, kewenangan dalam peruntukkan dan penggunaan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam sebagai kawasan industri. Otorita Batam yang saat ini bernama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.

BP Batam mempunyai tugas seperti pengelolaan, pengembangan, dan Pembangunan KPBPB Batam, sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). salah satu tugas BP Batam adalah mengembangkan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Dewan Kawasan Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pasal 3 Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam sesuai dengan fungsi KPBPB. Adanya pembangunan infrastruktur menunjukkan sebuah kawasan atau daerah sedang mengalami pertumbuhan. Infrastruktur merupakan salah satu penggerak dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga keberadaan infrastruktur menjadi sangatlah penting bagi setiap wilayah, baik di tingkat lokal ataupun Nasional. Seperti halnya pembangunan infrastruktur di Batam juga memiliki banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh berbagai pihak. Manfaat langsung yang dapat dirasakan dari pembangunan infrastruktur antara lain peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang ada, dan semakin terbukanya akses lapangan kerja. (Ngasi, 2023)

Pembangunan di Pulau Batam sedang mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan, krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia tidak berpengaruh besar pada kondisi investasi di Pulau Batam. Karena Batam mempunyai penanam Modal Asing dan Ekspor-Import. Demi

mewujudkan Kota Batam yang semakin maju dan berdaya saing, BP Batam dan Pemko Batam melakukan akselerasi pembangunan. Yang dilakukan dengan rencana menargetkan investasi dan mengevaluasi pemanfaatan ruang (ekon.go.id). Kebijakan yang diambil pastinya juga harus memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Kemajuan yang dialami oleh Batam diharapkan mampu mengangkat derajat perekonomian bagi daerah yang berada di sekitarnya. (Azizah dkk, 2021). Berbagai pembangunan infrastruktur seperti Listrik & Jalan, Air Bersih, Gas dan Telekomunikasi, Pelabuhan, dan Bandar Udara yang terus dilakukan oleh BP Batam merupakan usaha untuk merespons dari meningkatnya volume transaksi perdagangan (bpbatam.go.id). BP Batam terus-menerus berbenah untuk semakin menguatkan peningkatan pada sektor Pembangunan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sondang P.Siagian (2000) pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses Pembangunan.

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian literatur dan wawancara untuk mendapatkan gambaran tentang apa saja upaya pemerintah kota Batam dalam perkembangan pembangunan yang ada di kota Batam, maka dari itu dalam artikel ini terdapat berbagai sumber data dan referensi. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam menemukan berbagai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Diantaranya adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang

dihadapi yang berasal dari kajian dan penelitian sebelumnya, dan terdapat juga data yang didapatkan melalui berbagai artikel di Batam dan juga adanya wawancara. Subjek pelaku dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sekaligus orang yang diwawancarai. Pengumpulan data yang digunakan berupa research atau wawancara guna mendapatkan informasi terkait Upaya Pemerintah Dalam Strategi Perkembangan Pembangunan di Kota Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan di Batam saat ini telah terjadi sangat pesat pembangunan seperti bandara, pelabuhan dan juga pembangunan jalan yang sangat pesat dimana jalan dari 2 Jalur menjadi 5 jalur menuju bandara dan juga di batu Aji terjadi pembangunan Sekupang, batu ampar di semua sektor terjadi pembangunan. Rencana ke depan pembangunan BP Batam terus dilanjutkan dan direncanakan sampai tahun 2029 pembangunan di kota batam akan terus digalakkan guna menunjang produk ekonomi supaya semakin baik bahkan pengembangan yang dilakukan oleh BP batam adalah perluasan pembangunan Rempang, karena di rempang ini nanti akan dibangun beberapa perusahaan seperti perusahaan kaca dan juga perusahaan yang bergerak di bagian pariwisata dan semua itu akan dilakukan oleh BP batam. Upaya yang dilakukan oleh bp batam untuk pembagunan adalah menjalin kerjasama antar pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk pengembangan pembagunan di kota batam karena pembagunan di kota batam Ini sangat penting sekali mengingat letak strategis dari pada pulau batam itu sendiri yang berdekatan dengan negara- negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan juga daerah-daerah lainya untuk itu memang kota batam akan di buat menjadi daerah percontohan se-Indonesia mengenai pariwisata industri kalangan kapal dan juga dalam dunia penerbangan.

Dibatam ini juga nanti akan dibangun monorel dan juga beberapa industri manufaktur dan juga pelabuhan perantara internasional baik dari segi bongkar muat maupun dari segi distribusi dari pelabuhan ke berbagai unit-unit perusahaan yang terjadi eksport Import dalam perusahaan tersebut bahkan mengenai tenaga kerja di kota batam masih terbuka luas dan sangat diharapkan pembagunan di kota batam ini akan terus digalakkan sehingga bisa membuka lowongan pekerjaan dari berbagai daerah amat terlebih putra putri dari pada daerah tempatan yaitu batam sendiri (agus,2023). Mengingat nanti jika sudah terjadi pembagunan perusahaan di rempang akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak sampai ribuan untuk itu kedepan BP batam terus bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk bisa membangun pulau rempang kedepan menjadi kota yang maju, kota yang membuat penduduknya bisa memuat pengasilan di atas rata-rata daerah. lain itu harapan dari pada BP batam bahwa BP Batam akan selalu menciptakan bagaimana ekonomi di kota Batam selalu kondusif dan memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat di kota batam.

Mengenai keadaan pengembangan pembangunan di kota Batam saat ini berjalan terus bahkan seperti pembangunan jalan sudah hampir selesai di berbagai daerah seperti bundaran bandara sudah mencapai 85% sudah hampir selesai sehingga pembangunan-pembangunan itu akan tetap dilaksanakan sampai selesai. Rempang, di Rempang akan ada perusahaan dan juga berkerja sama dengan perusahaan dari Jakarta yang akan mengembangkan daerah itu ada beberapa perusahaan yang akan masuk yang menanamkan modalnya yang mencapai Rp 170 Triliun yakni adalah suatu upaya uang sangat besar sehingga Rempang sekarang lagi dikejar untuk pembebasan lahan dalam pembebasan lahan ini telah di buat semacam ganti rugi dari pada masyarakat supaya mereka bersedia direlokasi dari tempat itu sehingga nanti tempat itu akan di jadikan pusat bisnis yang sangat terpadu. Rempang sendiri akan digarap anak perusahaan grup Artha Graha milik Tomi Winata dimana nama perusahaan tersebut adalah PT Makmur Elok Graha atau yang disingkat dengan PT MEG.

Setelah sempat tertunda selama 18 tahun. Pengembangan kawasan Rempang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan langkah-langkah strategis pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Pengembangan Rempang ini sebetulnya sudah berjalan sejak 2004 silam, yang ditandai dengan adanya nota kesepahaman antara Pemkot Batam dan Otorita Batam dengan PT MEG. Nota kesepahaman itu terkait rencana pembangunan kota wisata di Rempang dan Galang. PT MEG yang merupakan anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tommy Winata ini mendapatkan konsesi kerja selama 80 tahun. Sayangnya, rencana tersebut harus tertunda lantaran adanya masalah pembebasan lahan. Proyek pengembangan Pulau Rempang diyakini akan memberikan keuntungan bagi negara dari sisi realisasi investasi, dan juga BP Batam selaku pemegang hak pengelolaan lahan di pulau tersebut dari sisi pemasukan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) (Kepri.bps.go.id).

KESIMPULAN

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memiliki peranan penting dalam pembangunan Kota Batam Di bawah kepemimpinan Edy Putra Irawady dan Muhammad Rudi, BP Batam fokus pada kemudahan perizinan bagi masyarakat dan investor serta peningkatan investasi di Kota Batam BP Batam juga menunjukkan keseriusannya mengembangkan Kota Batam dengan menerapkan sejumlah infrastruktur strategis proyek seperti jalan raya dan pengembangan Bandara Selain itu, BP Batam juga berencana mengembangkan Pulau Rempang untuk dijadikan sebagai motor penggerak baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. BP Batam lebih memprioritaskan Pembangunan infrastruktur yang mendukung perdagangan bebas. BP

Batam juga berperan dalam mendorong peningkatan nilai investasi juga merupakan suatu pencapaian yang tidak bisa dilepaskan dalam laju pertumbuhan ekonomi daerah. BP Batam juga berperan dalam menarik investasi asing di Kota Batam. Selain itu, BP Batam juga mempunyai beberapa rencana Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk meningkatkan volume perdagangan dan penanaman modal. Dalam hal ini, BP Batam memiliki peran sebagai organisasi berbasis bisnis dengan tujuan pengembangan ekonomi di Batam.

DAFTAR REFERENSI

- Agus, SE, diwawancarai oleh Nathasia Angelina Sargi dan Omi, November 2023. Kasi Mitigasi Pemadam Kebakaran BP. Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau.
- Azizah, A., Mulda, R., Parlindungan, R., & Pratiwi, D. A. (2023). KEPEMIMPINAN LURAH DALAM REALISASI PROGRAM PERCEPATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN TEMOYONG KECAMATAN BULANG KOTA BATAM. *Democratos: Journal of Politics and Governance*, 1(1).
- Ekon.go.id, “Gunakan Rencana Rinci, Pemerintah Akselerasi Investasi di KPBPB Batam Bintan Karimun” <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4313/gunakan-rencana-rinci-pemerintah-akselerasi-investasi-di-kpbbp-batam-bintan-karimun>> diakses tanggal 7 desember 2023.
- Ekonomi.bisnis.com, “5 fakta Megaproyek Pulau Rempang Milik Tomy Winata di Batam” <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230908/45/1692927/5-fakta-megaproyek-pulau-rempang-milik-tomy-winata-di-batam>> diakses tanggal 26 november 2023.
- Kepri.bps.go.id, “Jumlah Penduduk hasil Sensus Penduduk (SP)(jiwa),2010-2020” <<https://kepri.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk.html>> diakses tanggal 6 desember 2023.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973
- Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Mardiasmo. 2004.
- Modjo, N. S. M., & Tan, D. (2021). ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN ALOKASI LAHAN BARU OLEH BP BATAM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 6/G/2017/PTUN-TPI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2449-2462.
- Ngasi, E. F. D., & Wulandari, F. A. (2023). Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Pelaksanaan Program Area Traffic Control System (Atcs) Di Kota Batam Tahun 2019. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 216-227.

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 1 tahun 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007

Sejarah Batam, Dalam <https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam>), n.d., diakses 26/11/2023.

Setyobudi, Y. F., & Anggriani, G. (2021). PERAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM DALAM PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BATAM TAHUN 2017. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 62-73.

Siagian, S. P. (2000). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Stateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.